

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pelaksanaannya, pembangunan berjalan demikian pesat di wilayah perkotaan, sehingga menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Di sisi lain, wilayah pedesaan masih terbelang stagnan dalam segi ekonomi dan keterbatasannya di bidang teknologi. Ketidakmerataan pembangunan ini menimbulkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 2002 Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pertanian mengeluarkan program konsep agropolitan. Program ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan pengembangan wilayah yang berbasis pada potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang pada gilirannya, upaya tersebut akan berujung pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Konsep agropolitan merupakan konsep baru sebagai solusi yang tidak hanya membentuk arus urbanisasi, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi (Fiedman & Douglass dalam Rosdiana, Inayati, & Murwendah, 2014). Agropolitan merupakan jenis konsep pembangunan *bottom up* yang bertujuan untuk membangun ekonomi berbasis pertanian, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta untuk melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian (Fatkhianti et al., 2015). Pengembangan konsep agropolitan menjadi langkah strategis karena dapat menjadi tulang punggung negara dalam meningkatkan keberlanjutan nasional (Rosdiana et al., 2014).

Kebijakan konsep agropolitan berorientasi pada kekuatan pasar yang dilakukan melalui pemberdayaan usaha budidaya dan kegiatan agribisnis hulu (penyediaan saran pertanian) sampai dengan hilir (jasa-jasa pendukungnya). Agribisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian, meliputi salah satu keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi, pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan (Agustina & Artiningsih, 2017). Dalam hal ini, hasil produksi diolah agar terdiversifikasi sehingga nilai produk lebih tinggi daripada produk mentah.

Lebih dari itu, hal tersebut juga harus didukung dengan manajemen logistik yang lebih baik sehingga membantu bisnis yang berdaya saing (Zen & Dwiyantoro, 2014). Penerapan strategi teknis dan bisnis berupa pengetahuan teknis antara pengolah juga penting untuk meningkatkan nilai ekonomi (Saleh et al., 2014). Pengembangan bisnis dengan dukungan wirausaha merupakan strategi terbaik dalam pengembangan ekonomi pedesaan (Rădulescu et al., 2014). Strategi-strategi tersebut

memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam langkah pengembangan agropolitan untuk memastikan bahwa program agropolitan berjalan dengan baik karena program agropolitan cukup kompleks terutama dalam perencanaan dan implementasinya (Shaffril, Nasir, Idris, Uli & D'Silva dalam Agustina & Artiningsih, 2017).

Salah satu wilayah yang termasuk dalam pengembangan pedesaan melalui konsep agropolitan adalah Kabupaten Semarang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031, kawasan agropolitan ditetapkan di Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin, dan Bancak yang berfungsi sebagai pusat pelayanan, pemasaran produk pertanian lokal, pengembangan industri pertanian (agroindustri), dan pariwisata berbasis pertanian (agrowisata). Sepuluh kecamatan yang telah ditetapkan tersebut, hanya dua kecamatan yang telah memiliki kelengkapan administrasi dokumen perencanaan sebagai kawasan agropolitan, yaitu Kecamatan Sumowono dan Bandungan. Sementara, Kecamatan Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin, dan Bancak masih dalam tahap rintisan dan belum sepenuhnya memiliki kelengkapan administrasi ditetapkan sebagai kawasan agropolitan.

Berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum (2012), penilaian kesiapan lokasi kawasan agropolitan oleh pemerintah pusat dilihat berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan potensi lokasi kawasan yang diusulkan. Persyaratan administrasi meliputi dokumen perencanaan yang terdiri dari SK lokasi, SK pokja, *masterplan*, RPIJM, dan DED. Kecamatan Sumowono dan Bandungan telah memenuhi syarat kelengkapan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari, adanya Surat Menteri Pertanian No. 321/TU.210/A/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Candigaron Kabupaten Semarang, kelompok kerja (pokja) Agropolitan Candigaron dibentuk dan ditetapkan dengan SK Bupati Semarang No. 050/0007/2003 tanggal 29 Januari 2003, *masterplan* agropolitan KAPET Bandungan, pokja pendamping program pengembangan kawasan agropolitan pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandungan dengan SK Bupati Semarang No. 050/0431/2005 tanggal 27 Juni 2005. Sehingga, dalam hal ini fokus lokasi penelitian adalah di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan.

Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, kondisi program agropolitan di Kabupaten Semarang tidak berkembang dengan optimal atau mengalami stagnan. Hal ini dapat dilihat melalui kontribusi sektor pertanian Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan terhadap PDRB tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut berdampak pada kontribusi sektor pertanian PDRB Kabupaten Semarang yang mengalami penurunan tiap tahunnya, yaitu tahun 2014 (12.29%), tahun 2015 (12,40%), tahun 2016 (12.07%), tahun 2017 (11.53%), dan tahun 2018 (11.28%).

Kabupaten Semarang merupakan daerah pertama yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan di Jawa Tengah. Sebagai daerah pertama, seharusnya Kabupaten Semarang lebih mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi percontohan kawasan agropolitan bagi kawasan agropolitan lainnya di Jawa Tengah. Namun, berdasarkan hasil laporan Bappeda Jawa Tengah, Kabupaten Semarang tertinggal dari kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Magelang, Pemalang, Temanggung, Boyolali, Brebes, Purworejo, dan Karanganyar.

Penyebab stagnannya perkembangan agropolitan di Kecamatan Sumowono adalah kegiatan agropolitan yang dilakukan berfokus pada kegiatan produksi lahan (*on farm*). Kegiatan nilai tambah bagi produk pertanian (*off farm*) belum dilakukan karena kualitas sumberdaya manusia yang masih terbilang kurang dan kurangnya modal usaha. Hal ini juga dialami oleh Kecamatan Bandungan, dimana kegiatan agropolitan masih berfokus pada kegiatan produksi lahan (*on farm*). Sehingga, kegiatan agropolitan di kedua wilayah tersebut tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

Selain itu, Sub Terminal Agribisnis Candigaron yang terdapat di Sumowono juga tidak beroperasi dengan baik. Hal ini dikarenakan lokasi sub terminal agribisnis tersebut jauh dari lokasi permukiman masyarakat. Sehingga, petani cenderung menjual hasil produksi pertanian ke Sub Terminal Agribisnis Jetis yang cukup jauh dan memerlukan biaya transportasi. Disamping itu juga, kurangnya koordinasi antar stakeholder juga merupakan salah satu penyebab terhambatnya perkembangan agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan.

Perkembangan agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan yang terbilang stagnan akan dievaluasi oleh peneliti. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Subarsono, 2015). Adapun tujuan mengevaluasi suatu kebijakan, yaitu menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan, mengetahui apabila ada penyimpangan, dan sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Alasan dilakukannya evaluasi kebijakan adalah mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, menunjukkan pada stakeholder manfaat suatu kebijakan, dan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga, dengan melakukan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Melalui permasalahan yang telah disebutkan, maka peneliti melakukan evaluasi kinerja kebijakan pada sistem agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Evaluasi kinerja kebijakan dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap ketercapaian program tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menentukan faktor yang memengaruhi kinerja kebijakan pada sistem agropolitan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi umpan balik bagi para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai masukan untuk perbaikan program agropolitan.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan program agropolitan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota. Hal tersebut dapat terwujud melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan. Salah satu wilayah yang telah melakukan pengembangan pedesaan melalui konsep agropolitan adalah Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Program tersebut telah dimulai sejak tahun 2003 yang sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi, yaitu pengembangan wilayah yang disempurnakan menjadi revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan (RPPK).

Pada pelaksanaannya, kondisi program agropolitan tersebut menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang tidak berkembang dengan optimal atau mengalami stagnan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan berdampak pada kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Semarang yang mengalami penurunan tiap tahunnya. Penyebab stagnannya perkembangan agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Bandungan adalah kegiatan agropolitan yang dilakukan berfokus pada kegiatan produksi lahan (*on farm*). Kegiatan nilai tambah bagi produk pertanian (*off farm*) belum dilakukan karena kualitas sumber daya manusia yang masih terbilang kurang dan kurangnya modal usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan evaluasi kebijakan dengan pertanyaan penelitian adalah “bagaimana evaluasi kinerja kebijakan program agropolitan pada sistem agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan?”

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan pada sistem agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan bandungan.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Adapun sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan.
- Mengidentifikasi kawasan agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan.

- Mengevaluasi kinerja kebijakan dengan cara menganalisis faktor yang memengaruhi kinerja kebijakan pada sistem agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan.
- Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dalam implementasi kebijakan agropolitan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing ruang lingkup:

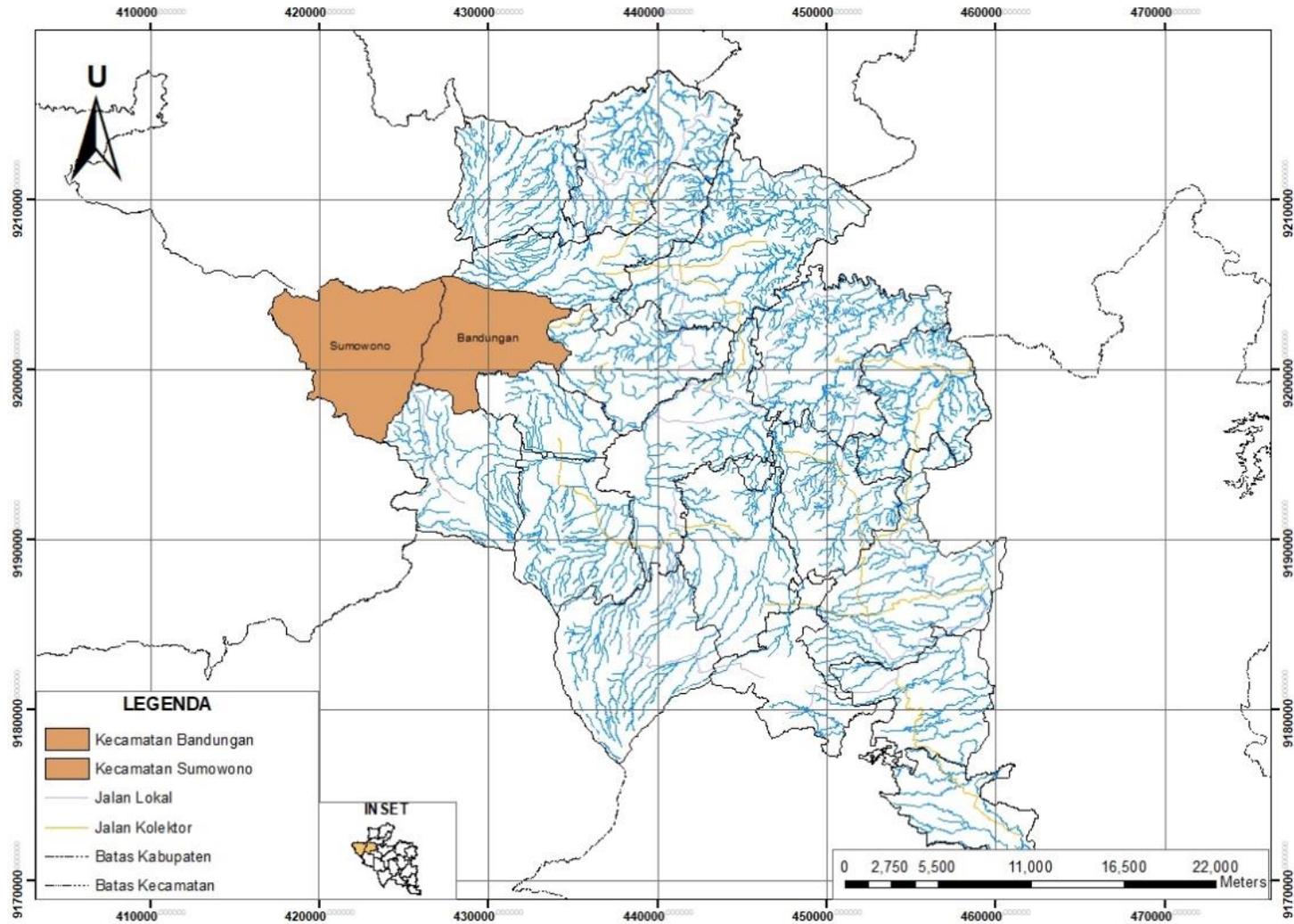
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah pada penelitian ini merupakan kawasan agropolitan yang berada pada Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kecamatan Sumowono memiliki luas wilayah sebesar 55,63 km² atau 5,43% dari luas Kabupaten Semarang. Adapun batas-batas administratif Kecamatan Sumowono adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kota Semarang, Kabupaten Kendal
- Sebelah timur : Kecamatan Bandungan, Kecamatan Jambu
- Sebelah selatan : Kecamatan Jambu, Kabupaten Temanggung
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal

Sementara, letak geografis Kecamatan Bandungan berada di bawah kaki Gunung Ungaran kurang lebih 15 km sebelah barat daya Kota Ungaran. Adapun batas-batas administrasi Kecamatan Bandungan adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Kendal
- Sebelah timur : Kecamatan Bergas dan Kecamatan Bawen
- Sebelah selatan : Kecamatan Ambarawa
- Sebelah barat : Kecamatan Sumowono



Gambar 1. 1 Lokasi Penelitian

Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang, 2011

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi bertujuan untuk membatasi pembahasan dalam penelitian agar lebih terfokus dan bahasan tidak terlalu luas. Penelitian ini akan fokus menilai kinerja program agropolitan berdasarkan faktor-faktor aspek yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- Isi kebijakan
- Komunikasi antar instansi
- Sumberdaya manusia dan materi
- Kapabilitas dan sikap pelaksana

Evaluasi ini dilakukan menggunakan variabel yang telah ditentukan berdasarkan kajian literatur.

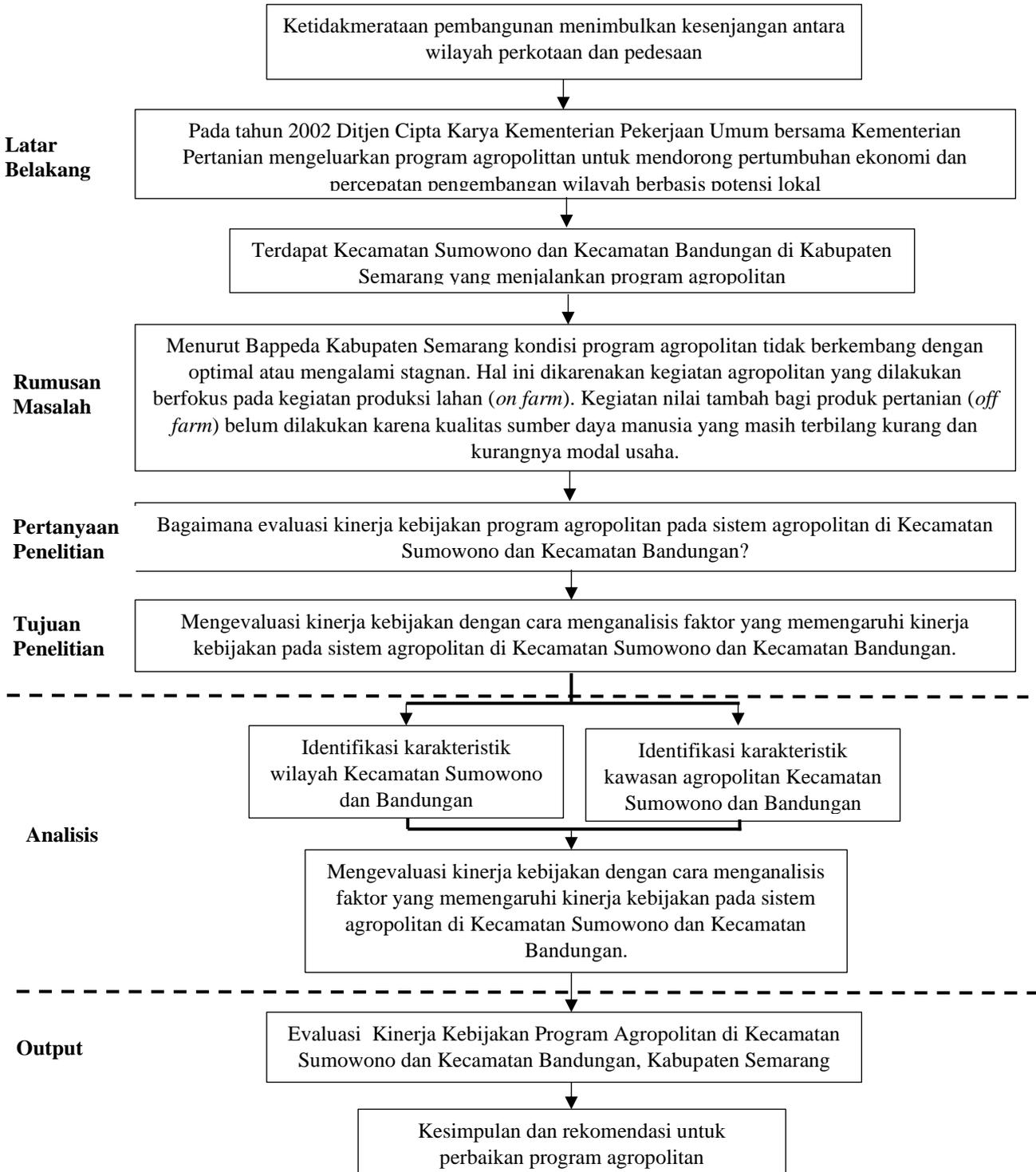
1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengevaluasi program agropolitan. Berikut adalah penjabarannya.

- Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di perkuliahan terutama terkait evaluasi dalam sebuah perencanaan.
- Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian serupa dengan memerhatikan aspek-aspek yang memengaruhi implementasi kebijakan, sehingga akan meningkatkan dan menambah informasi terkait.
- Bagi pemerintah Kabupaten Semarang, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan membantu penilaian ketercapaian tujuan, sasaran dan dampak dari program agropolitan.
- Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk mengetahui kondisi terkait program agropolitan sehingga dapat dilakukan strategi dalam mendukung program tersebut.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir merupakan sebuah panduan bagi peneliti yang menggambarkan penelitian secara ringkas. Kerangka pikir ini disusun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, input, analisis, dan output. Berikut ini merupakan kerangka pikir penelitian yang akan dilakukan.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020

Gambar 1. 2 Kerangka Pikir

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data secara ilmiah guna mencapai tujuan tertentu (Sugiono, 2014). Pendekatan penelitian adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi program agropolitan Kecamatan Sumowono dan Bandungan berdasarkan aspek-aspek yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Penelitian ini nantinya akan menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan agropolitan yang terhambat dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel, yang pada gilirannya dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik.

1.7.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (Sugiyono, 2012). Adapun objek penelitian ini dibagi menjadi dua bahasan yaitu populasi dan sampel penelitian.

a. Objek Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah atau banyaknya kelompok populasi dalam penelitian. Dalam menentukan besarnya sampel, apabila populasi kurang dari 100, maka lebih baik seluruh populasi dijadikan sampel. Sedangkan jika lebih dari 100 maka dapat diterapkan pengambilan sampel sebanyak 15%-20% atau 25%-30% dari populasi (Arikunto dalam Devi, 2003). Pada penelitian ini ditentukan jumlah populasi penelitian sebanyak dua, diantaranya kelompok tani yang mengikuti program agropolitan yang berada di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPP Sumowono dan BPP Bandungan, jumlah anggota kelompok tani Kecamatan Sumowono sebesar 5.823 jiwa dan jumlah anggota kelompok tani Kecamatan Bandungan sebesar 5.820 jiwa. Penentuan besaran sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel

N: Jumlah anggota kelompok tani

D: tingkat kepercayaan 90% ($\infty 0,1$)

Penelitian ini menggunakan derajat nilai ketelitian sebesar 10% dan menunjukkan tingkat kepercayaan penelitian sebesar 90%. Hasil besaran sampel adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{5.823}{5.823 (0,1^2) + 1}$$

$$n = \frac{5.823}{59,23}$$

$$n = 98,3 \text{ (Kecamatan Sumowono)}$$

$$n = \frac{5.820}{5.820 (0,1^2) + 1}$$

$$n = \frac{5.820}{59,2}$$

$$n = 98,3 \text{ (Kecamatan Bandungan)}$$

1.7.2 Kebutuhan Data

Kebutuhan data bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan proses pengumpulan data yang mendukung analisis penelitian. Kebutuhan data mencakup sasaran, variabel, nama data, tahun, jenis data, teknik pengumpulan dan sumber data. Berikut adalah daftar kebutuhan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel I. 1
Kebutuhan Data

Sasaran	Komponen	Nama Data	Tahun	Jenis Data	Teknik Pengumpulan	Sumber
Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan	Karakteristik wilayah	Potensi lokal	2020	Data Primer	Wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Sumber daya manusia	2020	Data Primer	Wawancara	Kelompok Tani dan BPP
Mengidentifikasi kawasan agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan	Karakteristik kegiatan agropolitan	Komoditas unggulan	2020	Data Primer	Wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan	2020	Data Primer	Observasi dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Kegiatan agribisnis	2020	Data Primer	Observasi dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP

Sasaran	Komponen	Nama Data	Tahun	Jenis Data	Teknik Pengumpulan	Sumber
Mengevaluasi kinerja kebijakan dengan cara menganalisis faktor yang memengaruhi kinerja kebijakan pada sistem agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan.	Subsistem agribisnis hulu	Sumberdaya kebijakan agropolitan	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
	Subsistem usaha tani	Staf memadai	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Memiliki pengetahuan kebijakan program agropolitan	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Komitmen pelaksana terhadap program agropolitan	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
	Subsistem agribisnis hilir	Memiliki keterampilan teknis dan manajerial	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Kompetensi pelaksana	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Kualitas peningkatan pasar	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
	Subsistem jasa-jasa penunjang	Manfaat kebijakan agropolitan Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Pelaksana kebijakan agropolitan	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Sumberdaya kebijakan agropolitan	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Kejelasan dan konsisten kebijakan agropolitan	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Komunikasi antar pemangku kepentingan	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Kerjasama dengan pelaksana	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Kerjasama dengan swasta	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP

Sasaran	Komponen	Nama Data	Tahun	Jenis Data	Teknik Pengumpulan	Sumber
		Sosialisasi program agropolitan pada pelaksana	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program agropolitan	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Bantuan dana dari pemerintah daerah	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Ketetapan alokasi anggaran	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Bantuan dana dari pihak swasta	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Kondisi fasilitas stasiun terminal agribisnis dari pemerintah	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP
		Kemauan pelaksana untuk berpartisipasi	2020	Data Primer	Kuesioner dan wawancara	Kelompok Tani dan BPP

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian, metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan data akan menghasilkan data yang valid sehingga mempermudah proses analisis. Berdasarkan kebutuhan data yang telah disebutkan, maka kebutuhan data akan dikumpulkan dengan metode survei primer dan survei sekunder. Survei primer terdiri dari observasi, kuesioner, dan wawancara, sementara survei sekunder dengan studi literatur dan telaah dokumen.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

- Observasi lapangan

Observasi lapangan merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat pada lokasi penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk melihat kondisi dari dampak program terhadap lingkungan sekitar kawasan agropolitan tersebut. Hasil observasi didokumentasikan dalam bentuk foto dan kemudian akan dijelaskan dalam gambaran umum program kebijakan agropolitan.

- Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber terpercaya untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada pengelola atau penanggung jawab kawasan agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan, pemangku wilayah dan SKPD terkait. Pertanyaan-pertanyaan pada wawancara bertujuan untuk mempertajam analisis terkait kinerja program kebijakan agropolitan yang sebelumnya telah muncul pada kuesioner. Hasil wawancara akan disampaikan pada gambaran umum program kebijakan agropolitan maupun sebagai tambahan data untuk analisis.

- Kuesioner

Kuesioner merupakan kumpulan daftar pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan pada responden untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat berdasarkan variabel yang telah ditentukan berdasarkan aspek yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini ditujukan pada kelompok tani yang mengikuti program kebijakan dan staf dinas terkait.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

- Studi Literatur

Studi literatur dimaksudkan untuk memperoleh teori atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data literatur yang terkait dengan penelitian ini dapat diperoleh melalui media internet, buku, jurnal, artikel, maupun data yang telah ada dari penelitian sebelumnya. Studi literatur dalam penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan program agropolitan.

- Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang tidak diperoleh melalui survei primer. Telaah dokumen ini didapatkan dari dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, dan dokumen publikasi. Data yang didapatkan dari telaah dokumen dapat berupa diagram, tabel, gambar data dari instansi pemerintah. Pada telaah dokumen dalam penelitian ini melihat kepada dokumen pelaksanaan program kebijakan agropolitan.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian evaluasi kebijakan agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik dan analisis skoring dan pembobotan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing teknik analisis yang digunakan.

a. Analisis Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik merupakan penerapan metode statistik yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Data penelitian yang akan diolah meliputi data yang berkaitan dengan aspek-aspek yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Data yang didapatkan dari hasil kuesioner akan disusun dalam tabel untuk setiap variabel yang telah ditetapkan. Kemudian tabel tersebut dibuat dalam bentuk grafik, untuk dideskripsikan hasilnya dengan memadukan grafik tersebut dengan wawancara dan observasi.

b. Analisis Skoring dan Pembobotan

Teknik ini merupakan teknik yang memberikan kesempatan lebih pada responden untuk menentukan skor pada masing-masing aspek yang telah ditetapkan. Teknik ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi program agropolitan melalui jawaban kuesioner. Bobot untuk masing-masing aspek adalah sama besar, agar dapat dilakukan penilaian terhadap aspek mana yang paling memengaruhi. Skor yang digunakan yaitu antara 1-3 untuk masing-masing indikator yang ada. Skor dari masing-masing agropolitan di kedua kecamatan kemudian ditotal dan dicari reratanya untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh. Berikut adalah tabel skor setiap kriteria.

Tabel I. 2
Skor Per Kriteria

Sasaran	Komponen	Sub Variabel	Kriteria	Kriteria Skor	
Mengevaluasi kinerja kebijakan dengan cara menganalisis faktor yang memengaruhi kinerja kebijakan pada sistem agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan.	Subsistem agribisnis hulu	Sumberdaya kebijakan agropolitan	Adanya bantuan benih dan peralatan pengolahan pertanian	1	Tidak ada bantuan benih dan bantuan peralatan pengolahan pertanian
				3	Ada bantuan benih dan bantuan peralatan pengolahan pertanian
	Subsistem usaha tani	Staf Memadai	Memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan, serta mampu bekerjasama dan berkomunikasi	1	Pelaksana tidak memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan akan program agropolitan, serta bekerja dengan lama dan kurang tepat
				2	Pelaksana cukup memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan akan program agropolitan, serta bekerja dengan tepat
				3	Pelaksana memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan akan program agropolitan, serta bekerja dengan cepat dan tepat

Sasaran	Komponen	Sub Variabel	Kriteria	Kriteria Skor	
		Memiliki pengetahuan akan program agropolitan	Memahami manfaat dan strategi pemasaran agropolitan	1	Tidak memahami manfaat agropolitan dan strategi pemasaran agropolitan
				2	Cukup memahami manfaat agropolitan dan strategi pemasaran agropolitan
				3	Memahami manfaat agropolitan dan strategi pemasaran agropolitan
		Komitmen pelaksana terhadap program agropolitan	Sikap pelaksana profesional, disiplin, bekerja dengan cepat dan tepat	1	Sikap pelaksana program agropolitan tidak konsisten, tidak disiplin, tidak bekerja dengan tepat
				2	Sikap pelaksana program agropolitan kurang konsisten, kurang disiplin, kurang bekerja dengan tepat
				3	Sikap pelaksana program agropolitan konsisten, disiplin, bekerja dengan tepat
	Subsistem agribisnis hilir	Memiliki keterampilan teknis dan manajerial	Inovasi produk lewat pengemasan menarik, promosi media online, dan pengawetan	1	Produk yang ditawarkan tanpa menggunakan kemasan, pengawetan, dan promosi media elektronik
				2	Produk yang ditawarkan baru menggunakan kemasan, produk diawetkan secara tradisional, dan baru memanfaatkan media elektronik untuk promosi
				3	Produk yang ditawarkan menggunakan kemasan yang lebih menarik, produk diawetkan agar tahan lama, dan memanfaatkan media elektronik untuk promosi produk
		Kompetensi pelaksana	Memanfaatkan teknologi dalam segi pemasaran dan pengolahan	1	Kesulitan menggunakan teknologi dalam segi pemasaran dan pengolahan
				2	Sedikit kesulitan menggunakan teknologi dalam segi pemasaran dan pengolahan

Sasaran	Komponen	Sub Variabel	Kriteria	Kriteria Skor	
		Kualitas peningkatan pasar	Tingkat pemasaran skala internasional	3	Tidak kesulitan menggunakan teknologi dalam segi pemasaran dan pengolahan
				1	Kegiatan pemasaran belum berorientasi pasar, masih berorientasi untuk konsumsi lokal
				2	Pemasaran yang digunakan hanya melalui pasar tradisional dengan skala pemasaran tingkat provinsi
				3	Pemasaran yang digunakan melalui stasiun terminal agribisnis dengan skala pemasaran tingkat internasional
	Subsistem jasa-jasa penunjang	Manfaat kebijakan agropolitan Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan	Adanya manfaat yang diterima dari program agropolitan	1	Masyarakat tidak menerima manfaat program agropolitan
				2	Masyarakat kurang menerima manfaat program agropolitan
				3	Masyarakat menerima manfaat program agropolitan
		Pelaksana kebijakan agropolitan	Pelaksana program agropolitan dijelaskan secara detail	1	Pelaksana program agropolitan hanya kelompok tani saja
				2	Pelaksana program agropolitan adalah kelompok tani dan BPP
				3	Terdapat pembagian pelaksana program yang detail berupa pihak yang melaksanakan, pihak yang memantau dan mengontrol
		Sumberdaya kebijakan agropolitan	Ketetapan alokasi anggaran dan pembagian fungsi tugas	1	Pihak BPP melakukan tugasnya dengan lama dan ketetapan alokasi anggaran tidak ada
				2	Terdapat pembagian fungsi tugas antar instansi dan pelaksana program agropolitan yang jelas, serta alokasi anggaran jarang ada
				3	Terdapat ketetapan alokasi anggaran yang

Sasaran	Komponen	Sub Variabel	Kriteria	Kriteria Skor	
					jelas dan pembagian fungsi tugas antar instansi maupun pelaksana program agropolitan
		Kejelasan dan konsisten kebijakan agropolitan	Kebijakan agropolitan jelas dan rinci	1	Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak jelas dan tidak konsisten
				2	Kebijakan terkait program agropolitan cukup jelas dan cukup konsisten
				3	Terdapat kebijakan terkait program agropolitan yang sangat jelas dan sangat konsisten
		Komunikasi antar pemangku kepentingan	Pertemuan antar pelaksana program	1	Tidak Terdapat pertemuan antara Dinas Pertanian, BPP, dan kelompok tani
				2	Terdapat pertemuan antara Dinas Pertanian, BPP, dan kelompok tani, namun tidak rutin
				3	Terdapat pertemuan antara Dinas Pertanian, BPP, dan kelompok tani secara rutin tiap bulan
		Kerjasama dengan pelaksana	Ikut serta pelatihan dan penyuluhan pertanian	1	Kelompok tani tidak berkomitmen dan tidak mengikuti pelatihan dan penyuluhan pertanian
				2	Cukup komitmen dan mengikuti pelatihan penyuluhan tepat waktu
				3	Komitmen, disiplin, dan bertanggungjawab dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan pertanian
		Kerjasama dengan swasta	Bantuan dana dan fasilitas pendukung agropolitan	1	Tidak terdapat kerjasama dengan swasta
				2	Kerjasama dengan pihak swasta baru dimulai dalam satu tahun terakhir.
				3	Terdapat kerjasama dengan swasta melalui bantuan dana dan fasilitas pendukung agropolitan
		Sosialisasi program agropolitan pada masyarakat	Sosialisasi kegiatan penyuluhan dan pemasaran	1	Tidak ada sosialisasi program agropolitan
				2	Sosialisasi program agropolitan dilakukan saat dibutuhkan saja.

Sasaran	Komponen	Sub Variabel	Kriteria	Kriteria Skor	
				3	Terdapat sosialisasi program agropolitan satu kali dalam sebulan.
		Pemantauan dan pengendalian pelaksana program agropolitan	Pemantauan dan pengendalian secara langsung oleh Dinas Pertanian dan BPP	1	Dinas pertanian dan BPP tidak melakukan pemantauan dan pengendalian secara langsung.
				2	Dinas pertanian dan BPP melakukan pemantauan dan pengendalian pada saat dibutuhkan saja.
				3	Dinas pertanian dan BPP melakukan pemantauan dan pengendalian secara langsung pada daerah agropolitan secara kontinyu
		Bantuan dana dari pemerintah daerah	Bantuan dana pemerintah rutin tiap bulan	1	Tidak tersedia bantuan dana dari pemerintah daerah, hanya bantuan benih dan teknologi
				2	Tersedia bantuan dana dari pemerintah daerah, namun tidak rutin
				3	Tersedia bantuan dana dari pemerintah daerah secara rutin setiap bulannya
		Ketetapan alokasi anggaran	Tersedia ketetapan alokasi anggaran tiap tahun	1	Tidak tersedia ketetapan alokasi anggaran untuk program agropolitan
				2	Tersedia ketetapan alokasi anggaran program agropolitan, namun tidak ada realisasinya
				3	Tersedia ketetapan alokasi anggaran untuk program agropolitan tiaptahun
		Bantuan dana dari pihak swasta	Bantuan dana sawasta rutin tiap tahun	1	Tidak tersedia bantuan dana dari swasta
				2	Tersedia bantuan dana dari swasta, namun tidak rutin
				3	Tersedia bantuan dana dari swasta secara rutin setiap tahun
		Kondisi fasilitas stasiun terminal	Fasilitas penyimpanan, pnegemasan,	1	Tersedia, namun jumlah terbatas dan tidak berfungsi dengan baik

Sasaran	Komponen	Sub Variabel	Kriteria	Kriteria Skor	
		agribisnis dari pemerintah	ruang parkir berfungsi dengan baik dan mudah dijangkau	2	Tersedia, namun jumlah terbatas dan berfungsi cukup baik
				3	Tersedia banyak fasilitas penyimpanan, pengemasan, ruang parkir, mudah dijangkau bagi masyarakat yang berkepentingan, dan berfungsi dengan baik
				3	Tidak kesulitan menggunakan teknologi dalam segi pemasaran dan pengolahan
		Kemauan pelaksana untuk berpartisipasi	Program dirasa sangat efektif dan efisien dalam membantu kondisi ekonomi masyarakat	1	Tidak membantu kelompok tani
				2	Cukup membantu kelompok tani
				3	Sangat membantu kelompok tani

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020

Setelah dilakukan skor pada nilai jawaban, kemudian menentukan skor tertinggi dan skor terendah. Adapun rumus penentuan penilaian dan skoring masing-masing variabel yang tersusun dalam komponen sistem kegiatan agropolitan adalah sebagai berikut:

a. Subsistem Agribisnis Hulu

Komponen subsistem agribisnis hulu terdiri dari 2 indikator dengan jumlah pilihan masing-masing sub variabel sebanyak 3. Sehingga penilaian skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah skor tertinggi} &= \text{skoring tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \\
 &= 3 \times 2 \rightarrow 6 \\
 &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah skor terendah} &= \text{skoring terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \\
 &= 1 \times 2 \rightarrow 2 \\
 &= \frac{2}{6} \times 100\% = 33,3\%
 \end{aligned}$$

b. Subsistem Usaha Tani

Komponen subsistem usaha tani terdiri dari 6 indikator dengan jumlah pilihan masing-masing sub variabel sebanyak 3. Sehingga penilaian skor tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah skor tertinggi} &= \text{skoring tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \\
 &= 3 \times 6 \rightarrow 18
 \end{aligned}$$

$$= \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah skor terendah} &= \text{skoring terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \\ &= 1 \times 6 \rightarrow 6 \\ &= \frac{6}{18} \times 100\% = 33,3\% \end{aligned}$$

c. Subsistem Agribisnis Hilir

Komponen subsistem agribisnis hilir terdiri dari 7 indikator dengan jumlah pilihan masing-masing sub variabel sebanyak 3. Sehingga penilaian skor tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah skor tertinggi} &= \text{skoring tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \\ &= 3 \times 7 \rightarrow 21 \\ &= \frac{21}{21} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah skor terendah} &= \text{skoring terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \\ &= 1 \times 7 \rightarrow 7 \\ &= \frac{7}{21} \times 100\% = 33,3\% \end{aligned}$$

d. Subsistem Jasa-jasa Pendukung

Komponen subsistem jasa-jasa pendukung terdiri dari 22 dengan jumlah pilihan masing-masing sub variabel sebanyak 3. Sehingga penilaian skor tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah skor tertinggi} &= \text{skoring tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \\ &= 3 \times 22 \rightarrow 66 \\ &= \frac{66}{66} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah skor terendah} &= \text{skoring terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \\ &= 1 \times 22 \rightarrow 22 \\ &= \frac{22}{66} \times 100\% = 33,3\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan penilaian tiap variabel diatas, maka pembagian kelas pada kriteria adalah sebagai berikut:

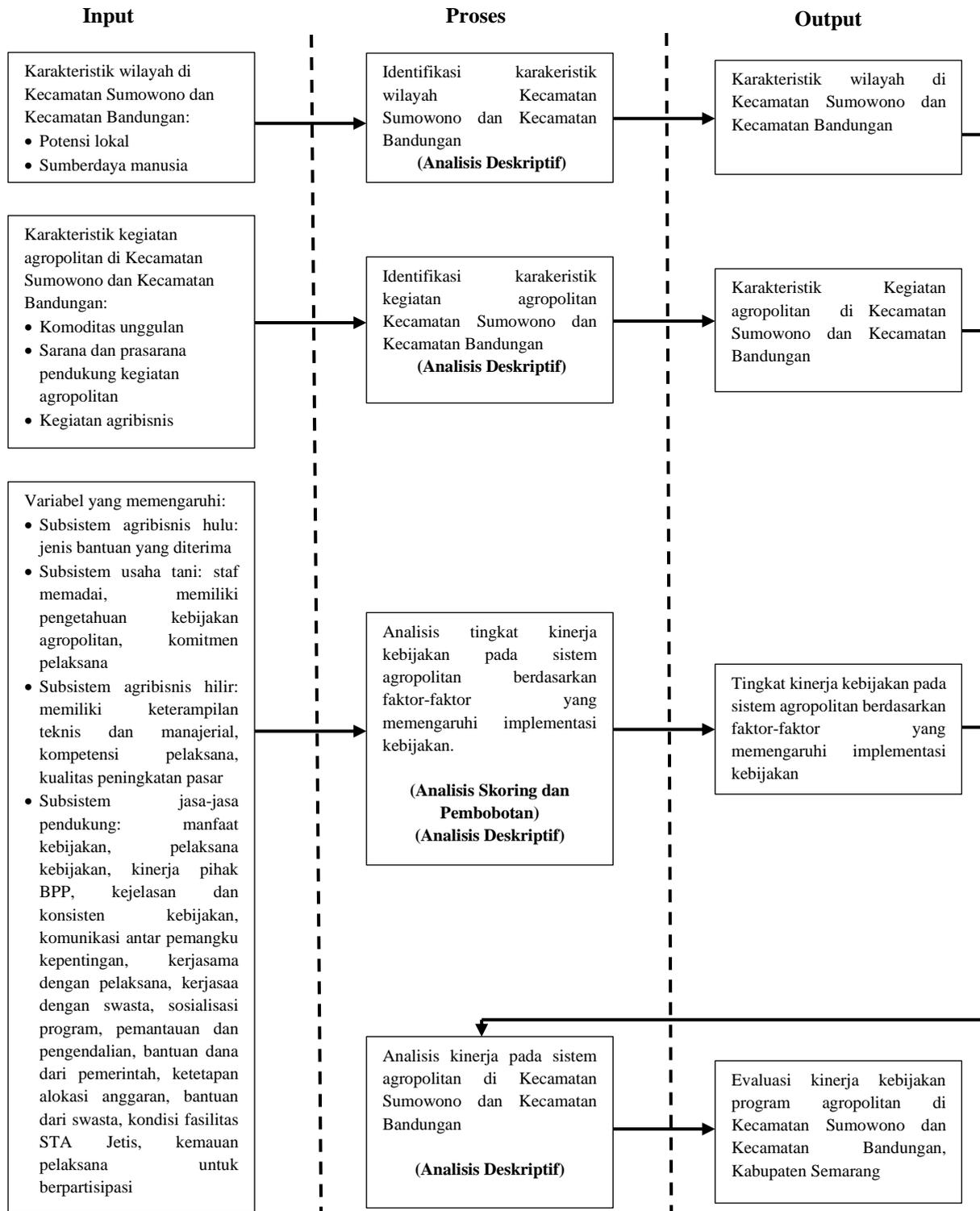
$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Kategori}} \\ &= \frac{100 - 33,3}{3} \\ &= \frac{100 - 33,3}{3} \rightarrow 22,23\% \end{aligned}$$

Maka kriteria skor adalah sebagai berikut:

- 33,3% - 55,53% = Kurang berhasil/rendah
- 55,53% - 77,76% = Cukup berhasil/sedang
- 77,76% - 100% = Berhasil/tinggi

1.7.5 Kerangka Analisis

Berikut merupakan kerangka analisis yang menjabarkan proses analisis dalam penelitian ini:



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020

Gambar 1. 3 Kerangka Analisis

1.8 Sistematika Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab. Berikut adalah gambaran pembahasan masing-masing bab tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, manfaat penelitian, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM AGROPOLITAN KECAMATAN SUMOWONO DAN KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG

Bab ini berisikan tentang definisi kebijakan publik, program kebijakan agropolitan, program agropolitan Kabupaten Semarang, implementasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan sehingga dapat ditemukan variabel-variabel yang dapat mendukung dan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari karakteristik umum, penggunaan lahan, dan kondisi sosial Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan. Pada bab ini juga menguraikan mengenai implementasi program agropolitan, hasil program agropolitan, fasilitas pendukung program agropolitan, dan kelembagaan program agropolitan.

BAB IV ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM AGROPOLITAN KECAMATAN SUMOWONO DAN KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis yang meliputi analisis isi kebijakan, analisis komunikasi antar instansi, analisis sumberdaya manusia dan materi, analisis kapabilitas dan sikap pelaksana yang tersusun dalam sistem kegiatan agropolitan. Sistem kegiatan agropolitan terdiri dari subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem agribisnis hilir, subsistem jasa-jasa pendukung. Hasil keempat analisis kemudian ditarik kesimpulan mana yang menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi program.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai masukan atau saran terhadap pihak yang terkait.

